

Politik Bahasa dan Masalah Kebahasaan di Indonesia

Dra. Siti Zahra Yundiafi, M.Hum.



PENDAHULUAN

Modul "Politik Bahasa dan Masalah Kebahasaan di Indonesia" ini terdiri atas tiga topik, yaitu 1) "Politik Bahasa" yang berbicara tentang dasar kebijakan bahasa nasional serta kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing; 2) "Masalah Kebahasaan di Indonesia" yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, serta 3) "Bahasa Daerah dan Otonomi Daerah" yang bertalian dengan peranan bahasa daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah serta proses penyerapan bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.

Setelah mempelajari modul ini, secara umum Anda diharapkan dapat memahami dasar politik bahasa dan berbagai masalah kebahasaan di Indonesia. Dengan kata lain, Anda diharapkan dapat:

1. menjelaskan dasar-dasar kebijakan bahasa nasional;
2. menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia;
3. menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa daerah;
4. menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa asing;
5. menjelaskan langkah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia;
6. menjelaskan langkah pembinaan dan pengembangan bahasa daerah;
7. menjelaskan langkah pembinaan dan pengembangan bahasa asing;
8. menjelaskan peranan pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan bahasa daerah;

Dalam mempelajari tiap-tiap topik, sebaiknya Anda berdiskusi dengan teman agar lebih mudah memahaminya.

KEGIATAN BELAJAR 1

Politik Bahasa Indonesia

Mengapa di Indonesia diperlukan adanya politik bahasa? Politik bahasa di Indonesia berkaitan dengan kondisi kebahasaan di Indonesia. Jika dibandingkan dengan kondisi kebahasaan negara lain, kondisi kebahasaan di Indonesia memperlihatkan ciri yang sangat kompleks. Mengapa? Masalah bahasa sangat berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa selain bahasa Indonesia, ratusan bahasa daerah dan sejumlah bahasa asing digunakan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Interaksi antaranggota masyarakat yang multibahasawan tentu akan menimbulkan saling pengaruh di antara bahasa yang digunakan itu. Bahasa Indonesia akan memperoleh pengaruh dari bahasa asing sebagai akibat dari keterbukaan masyarakat Indonesia terhadap dunia luar, lebih-lebih karena arus globalisasi dan teknologi modern. Selain itu, bahasa Indonesia juga akan dipengaruhi oleh bahasa daerah yang merupakan bahasa pertama (bahasa ibu) penutur bahasa Indonesia. Di pihak lain, bahasa daerah juga mendapat pengaruh dari bahasa Indonesia, terutama dalam pengungkapan konsep yang berkaitan dengan kehidupan modern. Di samping itu, ada kemungkinan bahasa daerah juga akan mendapat pengaruh dari bahasa asing karena adanya kontak budaya dengan penutur asing. Sehubungan dengan itu, masalah bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing itu perlu pengelolaan yang sungguh-sungguh, terencana, dan berkelanjutan berdasarkan kebijakan nasional tentang kebahasaan.

Ada tiga hal yang menjadi penyebab kompleksnya masalah kebahasaan di Indonesia, yaitu yang berkaitan dengan masalah (1) bahasa, (2) pemakai bahasa, dan (3) pemakaian bahasa. Aspek bahasa di Indonesia menyangkut bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Aspek pemakai bahasa terutama berkaitan dengan mutu dan keterampilan berbahasa seseorang. Dalam perilaku berbahasa tidak saja terlihat mutu dan keterampilan berbahasa seseorang, tetapi juga dapat diamati sikap pemakai bahasa terhadap bahasa yang digunakannya. Aspek pemakaian bahasa mengacu pada bidang kehidupan yang merupakan ranah pemakaian bahasa.

Pengaturan masalah kebahasaan yang kompleks itu perlu didasarkan pada politik yang mantap. Butir ketiga Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928,

yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang harus dijunjung dan dihormati oleh seluruh warga Indonesia, secara jelas merupakan pernyataan politik yang sangat mendasar dan strategis dalam bidang kebahasaan. Pasal 36 UUD 1945 berikut penjelasannya, yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, merupakan landasan konstitusional yang kokoh dan sekaligus sebagai pernyataan kehendak politik yang kuat dalam bidang kebahasaan. Selain itu, berbagai macam rekomendasi yang disepakati dalam tiap penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia perlu dicatat sebagai gambaran keinginan yang kuat dari para peserta agar segala sesuatu yang menyangkut masalah kebahasaan di Indonesia ditangani melalui upaya pembinaan dan pengembangan bahasa yang lebih efektif dan efisien.

Simpulan, pendapat, dan usul Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan tahun 1975 di Jakarta telah memberikan gambaran yang komprehensif dan lengkap mengenai butir-butir pokok yang harus diperhatikan dalam menangani masalah kebahasaan di Indonesia. Seminar Politik Bahasa Nasional itu membahas ketiga aspek kebahasaan yang telah disebutkan di muka, (bahasa, pemakaian bahasa, dan pemakaian bahasa). Selain itu, secara khusus dibahas juga tentang kedudukan dan fungsi bahasa yang merupakan kerangka dasar dalam perencanaan bahasa.

Kerangka dasar yang mantap akan menjadi sumber acuan bagi upaya pengembangan korpus bahasa dan pengidentifikasian ranah pemakaian bahasa. Kedua hal itu dapat dijadikan tolok ukur untuk mengetahui mutu dan keterampilan berbahasa seseorang, termasuk sikap bahasa yang bersangkutan. Sementara itu, rumusan hasil Seminar juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan pengajaran dan bahasa pengantar. Kedua hal itu merupakan bagian dari aspek pemakaian bahasa yang perlu memperoleh porsi perhatian yang sungguh-sungguh.

Sesuai dengan rumusan Seminar, pengembangan pengajaran bahasa ialah usaha dan kegiatan yang ditujukan kepada pengembangan pengajaran bahasa agar penutur bahasa memiliki keterampilan berbahasa, pengetahuan yang baik tentang bahasa, dan sikap positif terhadap bahasa, termasuk sastranya. Bahasa pengantar dirumuskan sebagai bahasa resmi yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan pelajaran kepada murid di lembaga-lembaga pendidikan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah

bahasa Indonesia. Dalam undang-undang itu juga dirumuskan tentang bahasa daerah dan bahasa asing. Dalam tingkat permulaan pendidikan, kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar. Jika diperlukan, dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu, bahasa daerah atau bahasa asing juga dapat digunakan sebagai bahasa pengantar.

Seminar Politik Bahasa Nasional Tahun 1975 menegaskan bahwa Politik Bahasa Nasional merupakan penjabaran terhadap penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil Seminar Politik Bahasa Nasional Tahun 1975 memuat rumusan yang bertajuk kesimpulan, pendapat, dan usul. Rumusan Kesimpulan diawali dengan paparan tentang pengertian dasar mengenai kebijakan nasional, bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa asing. Kebijakan nasional mengenai politik bahasa nasional berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan. Ditekankan juga bahwa penanganan masalah kebahasaan—bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing—itu perlu diupayakan secara berencana, terarah, dan menyeluruh.

Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan pada 8-2 November 1999 di Cisarua, Bogor, antara lain, merumuskan beberapa hal berikut.

A. KETENTUAN UMUM

1. **Politik Bahasa Nasional**, yang selanjutnya disebut **kebijakan bahasa nasional**, adalah kebijakan nasional yang mengatur pengarahan, perencanaan, dan ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar pengelolaan keseluruhan masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Keseluruhan masalah kebahasaan itu merupakan jalinan (1) masalah bahasa dan sastra Indonesia, (2) masalah bahasa dan sastra daerah, serta (3) masalah bahasa dan sastra asing di Indonesia. Pengelolaan keseluruhan masalah itu memerlukan adanya satu kebijakan nasional yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga pengelolaan masalah bahasa itu benar-benar terencana, terarah, dan menyeluruh.
2. **Bahasa Indonesia** adalah bahasa persatuan yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab

XV, Pasal 36, sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dapat juga disebut bahasa nasional atau bahasa kebangsaan.

3. **Bahasa Daerah** adalah bahasa yang dipakai sebagai bahasa perhubungan intradaerah atau intramasyarakat, di samping bahasa Indonesia, dan yang dipakai sebagai sarana pendukung sastra serta budaya daerah atau masyarakat etnik di wilayah Republik Indonesia. Bahasa-bahasa daerah merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.
4. **Bahasa Asing** di Indonesia adalah semua bahasa, kecuali bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah, dan bahasa serumpun Melayu. Bahasa asing yang berfungsi sebagai bahasa ibu warga negara Indonesia kelompok etnis tertentu tetap berkedudukan sebagai bahasa asing.
5. **Sastra Indonesia** adalah karya sastra berbahasa Indonesia dan merupakan bagian dari kebudayaan nasional.
6. **Sastra daerah** adalah sastra berbahasa daerah dan merupakan unsur kebudayaan daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional.
7. **Sastra asing** adalah sastra berbahasa asing dan merupakan bagian dari kebudayaan asing.

B. KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA DAN SASTRA

1. Kedudukan dan Fungsi Bahasa

Yang dimaksud dengan kedudukan bahasa ialah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya, yang dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan fungsi bahasa ialah peran bahasa yang bersangkutan di dalam masyarakat pemakainya.

a. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia

Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional. Kedudukan ini dimiliki oleh bahasa Indonesia sejak dicituskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan dimungkinkan oleh kenyataan bahwa (1) bahasa Melayu, yang mendasari bahasa Indonesia itu, telah dipakai sebagai bahasa perantara (*lingua franca*) selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan Indonesia dan (2) di dalam masyarakat Indonesia tidak terjadi "persaingan bahasa", yaitu

persaingan di antara bahasa daerah yang satu dan bahasa daerah yang lain untuk mencapai kedudukan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional.

Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai

1. lambang kebanggaan nasional,
2. lambang identitas nasional,
3. alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, serta
4. alat perhubungan antarbudaya dan antardaerah.

Kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia dapat disejajarkan dengan kebanggaan kita terhadap bendera Merah Putih atau lagu kebangsaan "Indonesia Raya". Rasa bangga terhadap bahasa Indonesia merupakan wujud sikap positif pemakainya. Sikap positif itu tercermin jika kita lebih senang menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa asing. Misalnya, dalam ajang perhelatan dunia, seperti Thomas Cup, yang diselenggarakan di Indonesia, Presiden Republik Indonesia memberikan sambutannya pada upacara pembukaan kegiatan itu dalam bahasa Indonesia. Kita juga akan bangga jika melihat papan nama yang bertuliskan "Balai Sidang Jakarta" atau "Rumah Makan Si Doel" daripada "*Jakarta Convention Center*" atau "*Si Doel Restaurant*".

Jati diri atau identitas kita sebagai bangsa Indonesia, antara lain, dapat diketahui melalui kemampuan kita menggunakan bahasa Indonesia, di samping kartu identitas yang lain, seperti kartu tanda penduduk (KTP), surat izin mengemudi (SIM), dan paspor. Oleh karena itu, melalui percakapan seseorang dalam bahasa Indonesia--tentu dengan lafal bahasa Indonesia yang baik--kita dapat menerka asal atau bangsa orang tersebut.

Sebagai alat pemersatu, bahasa Indonesia—yang semula berasal dari bahasa Melayu—terbukti dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang berbagai ragam etnis, budaya, agama, dan bahasa ibunya. Oleh karena itu, pada 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia menyatakan sikap politiknya yang dikenal dengan Sumpah Pemuda sebagai berikut:

1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia.
2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Pada teks di atas tampak jelas bahwa maksud ikrar pertama dan kedua berbeda dengan ikrar ketiga. Ikrar pertama dan kedua berupa pernyataan pengakuan terhadap tumpah darah dan bangsa yang satu, sedangkan ikrar ketiga berupa pernyataan sikap untuk menjunjung atau menempatkan bahasa Indonesia di atas bahasa daerah yang lain sebagai bahasa persatuan. Perlu Anda ingat bahwa butir ketiga Sumpah Pemuda itu tidak berbunyi, "*Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia,*" sebagaimana yang ada dalam ingatan (hafalan) anak didik atau masyarakat pada umumnya. Hal itu terjadi karena adanya lagu "Satu Nusa Satu Bangsa" yang lirik pertamanya berbunyi, "Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita" Seandainya butir ketiga Sumpah Pemuda itu berbunyi demikian, sebanyak 726 bahasa daerah yang kini masih hidup dan masih digunakan masyarakat penuturnya tentu tidak mempunyai hak hidup. Patut diakui bahwa para tokoh pemuda kita pada waktu itu sangat cerdas dan berpikir jauh ke depan sehingga ratusan bahasa daerah masih dapat bertahan hidup hingga kini. Walaupun demikian, ada juga yang menduga bahwa bahasa daerah yang jumlah penuturnya kecil lambat laun akan mengalami kepunahan.

Pernyataan sikap di atas dipertegas dalam penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bahasa-bahasa daerah yang dipelihara dengan baik, dihormati dan dipelihara juga oleh negara.

Dengan alat bahasa Indonesia, bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa itu mampu bersatu sehingga dapat mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Dapat dibayangkan seandainya tidak ada bahasa Melayu atau bahasa Indonesia pada waktu prakemerdekaan itu, bangsa Indonesia yang terdiri atas etnis Batak, Aceh, Minangkabau, Melayu, Sunda, Jawa, Bali, Makassar, Banjar, Bugis, dan sebagainya akan mengungkapkan gagasannya dalam bahasa etnis masing-masing. Jika itu yang terjadi, bagaimana mungkin mereka dapat menyatukan gagasannya untuk berjuang melawan penjajah.

Sebagai alat perhubungan, bahasa Indonesia mampu memperhubungkan bangsa Indonesia yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa ibunya yang berbeda-beda. Berkat bahasa nasional, suku-suku bangsa yang berbeda bahasa ibunya itu dapat berkomunikasi dengan lancar dan akrab. Dengan

modal bahasa Indonesia, kita dapat menjelajah seluruh wilayah negara Republik Indonesia tanpa hambatan komunikasi.

Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XV, Pasal 36, yakni *Bahasa negara ialah bahasa Indonesia*.

Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai

1. bahasa resmi kenegaraan,
2. bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan,
3. bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional,
4. bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional,
5. sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern,
6. bahasa media massa,
7. pendukung sastra Indonesia, serta
8. pemer kaya bahasa dan sastra daerah.

Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia dipakai dalam penyelenggaraan kenegaraan, seperti dalam upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan. Dokumen, surat keputusan, undang-undang, naskah pidato, dan surat-menyurat kenegaraan yang disusun atau dikeluarkan pemerintah, badan, atau lembaga pemerintahan lain harus tertulis dalam bahasa Indonesia.

Sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa resmi di semua jenjang pendidikan, dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Untuk mempermudah pemahaman siswa, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di tingkat permulaan, yakni di tingkat taman kanak-kanak sampai sekolah dasar tahun ketiga. Di wilayah Jawa Barat, misalnya, bahasa Sunda dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di taman kanak-kanak sampai kelas tiga sekolah dasar.

Sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa yang digunakan untuk membina dan mengembangkan kebudayaan nasional yang memiliki ciri dan identitas tertentu yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Misalnya, agar seni batik tulis yang berasal dari kebudayaan Jawa atau tenun songket dari Palembang dikenal oleh masyarakat Indonesia yang lebih luas, bahasa

Indonesia dipakai untuk mengenalkan dan mengembangkan kebudayaan tersebut.

b. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Daerah

Dalam hubungan dengan kedudukan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara, bahasa-bahasa yang digunakan masyarakat di Indonesia—kecuali bahasa Indonesia, bahasa rumpun Melayu, dan bahasa asing—berkedudukan sebagai bahasa daerah. Kedudukan tersebut berdasarkan kenyataan bahwa bahasa daerah itu digunakan sebagai sarana perhubungan dan pendukung kebudayaan di daerah atau dalam masyarakat etnik tertentu di Indonesia.

Dalam hubungan itu, bahasa daerah berfungsi sebagai

1. lambang kebanggaan daerah,
2. lambang identitas daerah,
3. alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah,
4. sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia, serta
5. pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia.

Dalam hubungan dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai

1. pendukung bahasa Indonesia,
2. bahasa pengantar pada tingkat permulaan sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan/atau pelajaran lain, serta
3. sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia.

c. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing

Dalam hubungan dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, bahasa selain bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa rumpun Melayu yang digunakan di Indonesia berkedudukan sebagai bahasa asing. Bahasa asing itu, baik yang digunakan dan diajarkan, maupun yang digunakan tanpa diajarkan di lembaga pendidikan tingkat tertentu, tidak bersaing dengan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara. Bahasa asing juga tidak bersaing dengan bahasa-bahasa daerah, baik sebagai lambang nilai sosial budaya maupun sebagai alat perhubungan masyarakat daerah.

Dalam kedudukannya sebagai bahasa asing, bahasa selain bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa rumpun Melayu, berfungsi sebagai

1. alat perhubungan antarbangsa dan
2. sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Bahasa-bahasa asing tertentu di Indonesia juga dapat memiliki fungsi lain. Bahasa Inggris, misalnya, merupakan bahasa asing yang diutamakan sebagai sumber pengembangan bahasa Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan tata istilah keilmuan. Sementara itu, bahasa Arab berfungsi sebagai bahasa keagamaan dan budaya Islam. Jika diperlukan, bahasa-bahasa asing lainnya juga dapat berfungsi sebagai pemer kaya perbendaharaan kata bahasa Indonesia.

2. Kedudukan dan Fungsi Sastra

Sastra Indonesia merupakan salah satu bentuk pengungkap pemikiran tentang masyarakat baru Indonesia. Sastra daerah, yang telah merekam berbagai aspek kehidupan dan budaya daerah, juga saling berinteraksi, telah hidup dan berkembang jauh sebelum munculnya sastra Indonesia. Sastra Indonesia dan daerah, baik yang lama maupun yang baru, tidak terlepas dari pengaruh dan pertemuannya dengan kebudayaan dan sastra asing, khususnya sastra India, Arab, dan Persia, serta sastra Barat (Eropa dan Amerika).

Dalam perkembangan selanjutnya sastra Indonesia menjadi media ekspresi berbagai gagasan modern dan pencerminan jati diri untuk membangun kebudayaan baru yang diilhami oleh kebudayaan tradisional dan kebudayaan modern. Sastra daerah berperan sebagai (1) fondasi kebudayaan daerah, bahkan kebudayaan Nusantara, (2) alat memperkuat budaya masyarakat di daerah, dan (3) cermin pencarian jati diri masyarakat yang bersangkutan. Sastra asing merupakan salah satu sumber inspirasi bagi pengarang dan salah satu sumber untuk mengenal budaya asing.

Berdasarkan paparan di muka, kedudukan dan fungsi sastra Indonesia, sastra daerah, dan sastra asing dapat dirumuskan sebagai berikut.

a. Kedudukan dan Fungsi Sastra Indonesia

Pengarang Indonesia mengekspresikan perasaan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam bentuk puisi, roman (novel), dan drama sebelum dicetuskannya Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan dan berlanjut terus sampai kini. Oleh karena itu, sastra Indonesia, sebagai bagian

kebudayaan nasional, berkedudukan sebagai wahana ekspresi budaya dan kehidupan masyarakat.

Dalam kedudukannya sebagai wahana ekspresi budaya, sastra Indonesia berfungsi sebagai alat untuk (1) menumbuhkan rasa kebangsaan, (2) menumbuhkan solidaritas kemanusiaan, dan (3) merekam kehidupan masyarakat Indonesia.

b. Kedudukan dan Fungsi Sastra Daerah

Sastra daerah merupakan bukti historis kreativitas masyarakat daerah. Sehubungan dengan hal itu, sastra daerah—sebagai salah satu bagian kebudayaan daerah—berkedudukan sebagai wahana ekspresi budaya yang merekam, antara lain, pengalaman estetik, religius, atau sosial politik masyarakat etnis yang bersangkutan.

Dalam kedudukannya sebagai wahana ekspresi budaya, sastra daerah berfungsi sebagai alat untuk (1) merekam kebudayaan daerah dan (2) menumbuhkan solidaritas kemanusiaan.

c. Kedudukan dan Fungsi Sastra Asing

Sastra asing yang merupakan bagian kebudayaan asing berkedudukan sebagai salah satu sumber inspirasi dan sumber pemahaman terhadap sebagian karya sastra Indonesia, terutama dalam bidang penelitian. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sastra asing, terutama sastra India, Arab, Persia, Eropa, dan Amerika akan sangat membantu upaya pengembangan sastra di Indonesia.

Dalam kedudukannya sebagai sumber inspirasi dan sumber pemahaman yang lebih komprehensif terhadap sastra Indonesia dan daerah, sastra asing mempunyai fungsi sebagai (1) pendorong penciptaan karya sastra di Indonesia, (2) sarana untuk lebih memahami sebagian sastra di Indonesia, (3) bahan kajian sastra bandingan, dan (4) penambah wawasan mengenai kebudayaan asing.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan mengapa Politik Bahasa diperlukan di negara kita ini?
- 2) Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Perilaku atau sikap apa saja yang dapat Anda tunjukkan berkaitan dengan fungsi tersebut!
- 3) Sebelum dicetuskannya Sumpah Pemuda, bahasa Melayu telah berabad-abad dipakai sebagai *lingua franca*. Jelaskan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Jelaskan jawaban Anda dengan merujuk kepada kompleksitas Politik Kebahasaan dan kebijakan nasional yang mengaturnya.
- 2) Jelaskan perilaku-perilaku yang seyogianya dilakukan oleh pecinta bahasa Indonesia.
- 3) Jelaskan pemakaian bahasa Melayu sebagai bahasa perantara di antara suku-suku bangsa di Indonesia dan sebagai bahasa perantara antarbangsa dalam bidang kehidupan.



RANGKUMAN

Masalah kebahasaan di Indonesia berkaitan dengan masalah (1) bahasa, (2) pemakai bahasa, dan (3) pemakaian bahasa. Aspek bahasa di Indonesia menyangkut bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Aspek pemakai bahasa terutama berkaitan dengan mutu dan keterampilan berbahasa seseorang. Perilaku berbahasa seseorang tidak saja memperlihatkan mutu dan keterampilan berbahasa seseorang, tetapi juga memperlihatkan sikap pemakai bahasa terhadap bahasa yang digunakannya. Aspek pemakaian bahasa mengacu pada bidang kehidupan yang merupakan ranah pemakaian bahasa, seperti ragam politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, sastra, ekonomi, dan agama.

Masalah kebahasaan yang kompleks itu perlu diatur berdasarkan politik bahasa atau kebijakan bahasa nasional yang mantap. Butir ketiga Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dalam hubungan itu, bahasa Indonesia harus dijunjung dan dihormati oleh seluruh warga Indonesia. Hal tersebut secara jelas merupakan pernyataan politik yang sangat mendasar dan strategis dalam bidang kebahasaan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 19945, berikut penjelasannya, menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Posisi itu merupakan landasan konstitusional yang kokoh dan sebagai pernyataan kehendak politik yang kuat dalam bidang kebahasaan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menyangkut masalah kebahasaan di Indonesia perlu ditangani melalui upaya pembinaan dan pengembangan bahasa yang lebih efektif dan efisien.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Dalam Bab XV Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa
 - A. bahasa resmi negara ialah bahasa Indonesia
 - B. bahasa negara ialah bahasa Indonesia
 - C. bahasa negara ialah bahasa-bahasa Indonesia
 - D. bahasa negara ialah bahasa-bahasa yang ada di Indonesia

- 2) Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi berikut, *kecuali*
 - A. alat pemersatu antarsuku
 - B. alat pengembang iptek
 - C. alat perhubungan antardaerah
 - D. lambang identitas nasional

- 3) Dalam upacara pengangkatan sultan di Keraton Yogyakarta digunakan bahasa Jawa. Dalam situasi itu bahasa Jawa berfungsi sebagai
 - A. bahasa resmi daerah
 - B. lambang kebanggaan daerah
 - C. lambang identitas daerah
 - D. alat komunikasi antardaerah

- 4) Dalam upacara adat perkawinan di Sumatra Utara digunakan bahasa Batak. Dalam situasi itu bahasa Batak berfungsi sebagai
 - A. bahasa resmi daerah
 - B. lambang kebanggaan daerah
 - C. lambang identitas daerah
 - D. alat komunikasi antardaerah

- 5) Sejak berabad-abad yang lalu bahasa Melayu telah dipakai sebagai *lingua franca* di wilayah Nusantara. Kata *lingua franca* berarti
 - A. bahasa perhubungan
 - B. bahasa pergaulan
 - C. bahasa persatuan
 - D. bahasa perantara

- 6) Pada zaman pendudukan Jepang bahasa pengantar yang digunakan di sekolah Indonesia adalah
 - A. bahasa Jepang
 - B. bahasa Melayu
 - C. bahasa Indonesia
 - D. bahasa Jepang dan bahasa Indonesia

- 7) Dalam acara perkawinan masyarakat Jawa Barat dipergelarkan wayang golek semalam suntuk dengan menggunakan bahasa Sunda. Dalam situasi tersebut, bahasa Sunda berfungsi sebagai
 - A. bahasa resmi daerah
 - B. lambang kebanggaan daerah
 - C. lambang identitas daerah
 - D. alat komunikasi antardaerah

- 8) Pada tahun 1938 diadakan Kongres Pertama Bahasa Indonesia di Solo. Bahasa yang digunakan pada kongres tersebut adalah bahasa Indonesia. Dalam situasi tersebut bahasa Indonesia berkedudukan sebagai
 - A. bahasa resmi
 - B. bahasa nasional
 - C. bahasa negara
 - D. bahasa pergaulan

- 9) Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai berikut, kecuali
 - A. alat perhubungan antardaerah
 - B. bahasa resmi kenegaraan

- C. bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional
 - D. bahasa media massa
- 10) Dalam kedudukannya sebagai bahasa asing, bahasa Arab berfungsi sebagai
- A. alat perhubungan antarbangsa
 - B. sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern
 - C. sumber utama pengembangan istilah keilmuan
 - D. bahasa keagamaan dan budaya Islam

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra

Yang dimaksud dengan pembinaan dan pengembangan dalam hubungannya dengan masalah kebahasaan di Indonesia ialah usaha-usaha yang ditujukan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pengajaran bahasa asing supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya.

A. PEMBINAAN BAHASA

Yang dimaksud dengan pembinaan bahasa ialah upaya untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa. Usaha pembinaan itu mencakup upaya peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa yang dilakukan, antara lain, melalui pengajaran dan pemasyarakatan.

1. Pengajaran Bahasa

a. Pengajaran Bahasa Indonesia (Termasuk Bahasa Indonesia untuk Pembelajar Asing)

Pengajaran bahasa Indonesia melalui sistem persekolahan dilakukan dengan mempertimbangkan bahasa sebagai satu keseluruhan berdasarkan konteks pemakaian bahasa yang baik dengan tidak mengabaikan adanya berbagai ragam bahasa Indonesia yang hidup dalam masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan bahasa itu dilakukan melalui kegiatan berikut:

1. pengembangan kurikulum bahasa Indonesia;
2. pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan metodologi pengajaran bahasa;
3. pengembangan tenaga kependidikan kebahasaan yang profesional; serta
4. pengembangan sarana pendidikan bahasa yang memadai; terutama sarana uji kemahiran bahasa.

b. Pengajaran Bahasa Daerah

Pengajaran bahasa daerah ditujukan untuk meningkatkan mutu penguasaan dan pemakaian bahasa daerah yang dipelihara oleh masyarakat penuturnya. Peningkatan mutu pengajaran bahasa daerah itu dilakukan melalui kegiatan berikut:

1. pengembangan kurikulum bahasa daerah;
2. pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan metodologi pengajaran bahasa;
3. pengembangan tenaga kependidikan kebahasaan yang profesional;
4. pengembangan sarana pendidikan bahasa yang memadai;
5. penyediaan program pendidikan bahasa daerah di jenjang pendidikan tinggi setempat; serta
6. penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas permulaan pada jenjang pendidikan dasar.

c. Pengajaran Bahasa Asing

Pengajaran bahasa asing ditujukan pada upaya penguasaan dan pemakaian bahasa asing, terutama untuk pemanfaatan ilmu dan teknologi dalam menyikapi persaingan bebas pada era globalisasi, agar lebih banyak orang Indonesia yang mampu memanfaatkan informasi dalam bahasa asing. Peningkatan mutu pengajaran bahasa asing dilakukan melalui kegiatan berikut:

1. pengembangan kurikulum bahasa asing;
2. pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dalam era global dan dengan perkembangan metodologi pengajaran bahasa;
3. pengembangan tenaga pengajar bahasa asing yang profesional;
4. pengembangan sarana pengajaran bahasa asing yang memadai;
5. pemanfaatan teknologi informasi dalam bahasa asing.

Sesuai dengan sifat dan jenis pendidikan, pengajaran bahasa asing ada yang bersifat wajib dan ada yang pilihan. Mata pelajaran bahasa asing pilihan hendaknya diberikan sekurang-kurangnya 90 jam dalam satu tahun ajaran. Dalam hubungan dengan pengajaran bahasa asing, ada tiga bahasa yang perlu diperhatikan.

1. Bahasa Inggris

- a) Pengajaran bahasa Inggris dapat diberikan mulai di sekolah dasar dengan syarat kesiapan sekolah yang benar-benar memadai.

- b) Pengajaran bahasa Inggris di jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama ditekankan pada penguasaan pengetahuan dasar yang diperlukan untuk dikembangkan di pendidikan yang lebih tinggi.
- c) Pengajaran bahasa Inggris di jenjang sekolah lanjutan tingkat atas ditekankan pada perluasan pengetahuan dengan pengutamaan keterampilan.
- d) Pengajaran bahasa Inggris di jenjang pendidikan tinggi ditekankan pada pementapan keempat keterampilan bahasa (berbicara, mendengar, membaca, menulis) agar lulusan perguruan tinggi mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris, baik secara lisan maupun secara tertulis. Untuk itu, perlu dilakukan pelatihan secara intensif. Dalam hubungan itu, bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam mata kuliah tertentu (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2645/U/1999 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi).
- e) Pemanfaatan penutur asli bahasa Inggris untuk pengajaran bahasa Inggris di Indonesia hendaknya didasarkan pada kebutuhan.

2. Bahasa Arab

- a) Bahasa Arab diberikan sebagai mata pelajaran wajib pada sekolah yang berasaskan Islam.
- b) Di sekolah yang tidak berasaskan Islam bahasa Arab dapat diberikan sebagai mata pelajaran pilihan pada jenjang pendidikan menengah.
- c) Pada jenjang pendidikan tinggi bahasa Arab dapat diberikan sebagai mata kuliah.

3. Bahasa Asing Lain

Selain bahasa Inggris dan bahasa Arab, bahasa asing lain dapat diberikan sebagai mata pelajaran pilihan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

2. Pemasarakatan Bahasa dan Sastra

a. Pemasarakatan Bahasa Indonesia

Pemasarakatan bahasa Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan sikap positif masyarakat--terutama di kalangan pemerintah dan kelompok

profesi—terhadap bahasa Indonesia dan meningkatkan mutu penggunaannya. Pemasyarakatan bahasa Indonesia juga harus menjangkau kelompok yang belum dapat berbahasa Indonesia agar berperan lebih aktif dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih maju. Pemasyarakatan bahasa Indonesia ke seluruh lapisan masyarakat itu diarahkan pada upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pemasyarakatan bahasa Indonesia dilakukan dengan tidak meninggalkan kekayaan bahasa dan budaya masyarakat setempat. Untuk itu, pemasyarakatan bahasa Indonesia dilakukan melalui kegiatan berikut:

1. pengembangan bahan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran;
2. pemanfaatan teknologi informasi dengan sebaik-baiknya;
3. peningkatan kerja sama dengan semua pihak yang dapat memperlancar pemasyarakatan bahasa Indonesia di Indonesia;
4. peningkatan mutu tenaga pemasyarakatan;
5. pemanfaatan sarana uji kemahiran berbahasa Indonesia.

b. Pemasyarakatan Bahasa Daerah

Pemasyarakatan bahasa daerah ditujukan pada upaya peningkatan sikap positif terhadap bahasa daerah dan penciptaan situasi yang kondusif dalam menggunakan bahasa daerah dengan mengacu pada nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Untuk itu, pemasyarakatan bahasa daerah dilakukan melalui kegiatan berikut:

1. pemberian dorongan penerbitan berbahasa daerah;
2. pengikutsertaan tokoh masyarakat dan budayawan dalam pemasyarakatan penggunaan bahasa daerah dalam situasi tertentu; serta
3. peningkatan peran masyarakat (kelompok seniman tradisional) dalam memberikan informasi tentang penggunaan bahasa daerah.

B. PENGEMBANGAN BAHASA

Yang dimaksud dengan pengembangan bahasa ialah upaya meningkatkan mutu bahasa agar dapat dipakai untuk berbagai keperluan dalam kehidupan masyarakat modern. Pengembangan bahasa, antara lain, dilakukan melalui penelitian, pembakuan, dan pemeliharaan.

1. Penelitian bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Bahasa Asing

- a. Penelitian berbagai aspek bahasa Indonesia perlu dilakukan untuk kepentingan peningkatan mutu bahasa Indonesia. Penelitian berbagai bidang pemakaian bahasa Indonesia perlu dilakukan dalam upaya peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia.
- b. Penelitian berbagai aspek bahasa daerah perlu dilakukan untuk kepentingan perekaman (inventarisasi) bahasa-bahasa daerah. Penelitian berbagai aspek bahasa daerah dan pemakaiannya perlu dilakukan untuk keperluan peningkatan mutu bahasa daerah yang dipelihara oleh penuturnya.
- c. Penelitian terhadap bahasa asing di Indonesia perlu dilakukan untuk mencegah bahasa asing dapat dimanfaatkan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Penelitian pengajaran bahasa asing di Indonesia perlu dilakukan untuk keperluan peningkatan mutu pengajarannya.

2. Pembakuan

Pembakuan bahasa Indonesia dilakukan dengan memperhatikan asas demokrasi dan keragaman bahasa Indonesia serta diarahkan untuk menciptakan komunikasi yang lebih luas dan efektif. Hal itu dilakukan, antara lain, melalui penyusunan pedoman, kamus bahasa dan kamus bidang ilmu, tata bahasa, serta bahan pemasyarakatan bahasa.

Pembakuan bahasa daerah dilakukan dengan memperhatikan keinginan masyarakat pendukungnya guna menciptakan komunikasi yang luas dan efektif di kalangan masyarakat pendukungnya. Pembakuan itu dilakukan, antara lain, melalui penyusunan pedoman, kamus bahasa, dan tata bahasa.

3. Pemeliharaan

Pemeliharaan bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi modern yang terbuka dan dinamis. Pemeliharaan bahasa Indonesia dilakukan berdasarkan perkembangan sosiokultural dan konteks sosial, ekonomi, budaya, dan politik bangsa Indonesia.

Pemeliharaan bahasa daerah terutama ditujukan pada bahasa daerah yang dipelihara oleh masyarakat penuturnya. Pendokumentasian bahasa daerah yang terancam punah perlu diprioritaskan.

C. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SASTRA

Yang dimaksud dengan pembinaan dan pengembangan sastra adalah usaha-usaha yang diarahkan untuk memelihara dan mengembangkan sastra Indonesia dan daerah, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra Indonesia dan daerah, serta memanfaatkan sastra asing supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya.

1. Pembinaan Sastra

Yang dimaksud dengan pembinaan sastra ialah upaya untuk meningkatkan mutu apresiasi sastra. Upaya itu meliputi pengajaran, pemasyarakatan, dan pemberdayaan sastra.

a. *Pengajaran Sastra*

Tujuan pengajaran sastra pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana yang tertera dalam kurikulum yang selama ini berlaku, tidak mungkin tercapai karena sampai saat ini pengajaran sastra merupakan bagian kecil dari pengajaran bahasa. Di samping itu, ketersediaan guru dengan kelayakan memadai juga sangat terbatas. Oleh karena itu, metode pengajaran sastra sering kurang tepat, sementara bahan ajar yang tersedia belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, pengajaran sastra hendaknya

1. tidak lagi merupakan bagian dari pengajaran bahasa;
2. didukung dengan pengadaan guru yang berkelayakan mengajarkan sastra;
3. didukung dengan ketersediaan karya sastra yang memadai di sekolah;
4. diupayakan agar sastrawan atau tokoh kritik sastra, baik lokal maupun nasional,
5. lebih banyak dimanfaatkan, antara lain, melalui kegiatan tatap muka dengan guru sastra dan siswa; serta
6. didukung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

b. *Pemasyarakatan Sastra*

1) Pemasyarakatan Sastra Indonesia

Pemasyarakatan sastra Indonesia dimaksudkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra Indonesia. Pemasyarakatan sastra Indonesia sebaiknya menjangkau kelompok

yang belum mampu berbahasa Indonesia dengan baik seiring dengan upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia. Pemasyarakatan sastra Indonesia ke seluruh lapisan masyarakat diarahkan untuk menunjang keberhasilan upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia. Pemasyarakatan sastra Indonesia dilakukan dengan memperhatikan dan memanfaatkan kekayaan sastra Nusantara, antara lain mengacu pada nilai-nilai budaya masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pemasyarakatan sastra Indonesia hendaknya mempertimbangkan hal berikut:

- a) Untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra Indonesia, penerbitan karya sastra perlu digalakkan, antara lain melalui edisi karya sastra klasik yang disederhanakan untuk siswa pendidikan dasar. Selain itu, berbagai cara dapat ditempuh, misalnya dengan memperkenalkan sastrawan terkemuka melalui penggunaan gambar sastrawan terkenal pada uang, prangko, kalender, buku ajar, dan buku tulis.
 - b) Pemasyarakatan sastra tidak hanya dilakukan dalam masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia. Oleh karena itu, penerjemahan karya sastra Indonesia ke dalam bahasa-bahasa internasional perlu digalakkan.
 - c) Pemasyarakatan sastra Indonesia dalam dunia internasional juga dapat dilaksanakan dengan mendorong keikutsertaan dan/atau penampilan sastrawan, kritikus, dan tokoh sastra Indonesia dalam pertemuan-pertemuan internasional.
 - d) Pemasyarakatan sastra hendaknya diupayakan agar dapat memantapkan kedudukan dan meningkatkan fungsi sastra dalam kehidupan masyarakat. Hal itu diharapkan dapat memberdayakan tiga komponen utama kehidupan sastra, yaitu sastrawan, karya sastra, dan masyarakat penikmat sastra.
- 2) Pemasyarakatan Sastra Daerah
- Pemasyarakatan sastra daerah ditujukan pada upaya peningkatan kesadaran akan peran sastra daerah dalam kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan, terutama dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Dalam hubungan itu, pemasyarakatan sastra daerah hendaknya ditujukan pada penciptaan situasi yang memungkinkan sastra daerah tetap hidup dan berkembang sesuai dengan tuntutan

zaman dengan tidak meninggalkan nilai budaya daerah yang bersangkutan. Berdasarkan hal itu, pemasyarakatan sastra daerah hendaknya mempertimbangkan hal-hal berikut.

- a) Pemasyarakatan sastra daerah dalam masyarakat Indonesia dapat dilakukan, antara lain, dengan menerjemahkan karya-karya sastra daerah ke dalam bahasa Indonesia.
- b) Pemasyarakatan sastra daerah tidak hanya dilakukan dalam masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia. Oleh karena itu, penerjemahan karya sastra daerah ke dalam bahasa-bahasa internasional perlu digalakkan.
- c) Pemasyarakatan sastra daerah hendaknya diupayakan agar dapat memantapkan kedudukan dan meningkatkan fungsi sastra daerah dalam kehidupan masyarakat. Hal itu diharapkan dapat memberdayakan tiga komponen utama kehidupan sastra, yaitu sastrawan, karya sastra, dan masyarakat.

c. *Pemberdayaan Sastra*

Pemberdayaan sastra ditujukan pada pemantapan kedudukan dan peningkatan fungsi sastra dalam kehidupan masyarakat. Dengan mantapnya kedudukan dan meningkatnya fungsi sastra dalam kehidupan masyarakat, diharapkan karya sastra yang bermutu akan lahir di tengah masyarakat yang sadar sastra.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia modern upaya tersebut makin dirasakan penting dan mendesak karena saat ini kegiatan bersastra dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat makin lemah. Sehubungan dengan kenyataan itu, komponen utama kehidupan sastra, yakni sastrawan, karya sastra, dan masyarakat, perlu lebih mendapat perhatian secara sungguh-sungguh. Karya sastra bermutu lebih mungkin tercipta jika penciptanya dapat berkarya dalam situasi dan suasana yang baik (memungkinkan lahirnya karya yang bermutu). Dukungan masyarakat luas yang berupa apresiasi sastra akan merangsang pertumbuhan sastra yang lebih subur dan bermutu. Dengan mempertimbangkan pokok-pokok tersebut, pemberdayaan dapat dilakukan, antara lain melalui hal berikut.

1. Sastrawan perlu memperoleh perlindungan hak cipta, kebebasan berekspresi, dan penghargaan yang baik dari masyarakat.
2. Kritik sastra perlu disebarluaskan sehingga masyarakat dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan karya sastra.

3. Karya sastra yang bermutu yang belum dapat dinikmati oleh kalangan tertentu, seperti siswa pendidikan dasar, perlu disesuaikan sedemikian rupa agar dapat lebih mudah mereka serap.
4. Apresiasi sastra masyarakat luas perlu diberdayakan, antara lain, melalui pengembangan komunitas sastra.
5. Peningkatan sarana kehidupan sastra, seperti publikasi dan dokumentasi sastra, komunitas sastra, dan pusat-pusat kegiatan sastra perlu lebih diperhatikan.

Kesadaran masyarakat akan peran sastra dalam kehidupan masyarakat modern perlu digalakkan. Dalam hal ini media massa dan pendidikan sekolah akan sangat membantu menumbuhkan kesadaran itu. Peran serta pemerintah dalam mendukung terbentuknya masyarakat sadar sastra dapat diwujudkan, antara lain melalui penyediaan fasilitas, seperti perpustakaan keliling dan keringanan harga buku, yang memungkinkan karya sastra yang bermutu dapat dibaca dan dibeli masyarakat dengan mudah dan murah.

2. Pengembangan Sastra

Yang dimaksud dengan pengembangan sastra ialah upaya meningkatkan mutu sastra agar dapat dimanfaatkan sebagai media ekspresi, sebagai pencerminan dan pencarian jati diri untuk membangun kebudayaan baru, dan sebagai sarana peningkatan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat. Upaya pengembangan sastra itu meliputi penelitian dan pemeliharaan.

a. Penelitian

Komunitas sastra Indonesia dan komunitas sastra daerah merupakan satu komunitas sastra se-Indonesia. Komunitas sastra se-Indonesia merupakan pula bagian dari komunitas sastra yang lebih luas, seperti komunitas sastra Asia Tenggara, komunitas sastra Asia, dan komunitas sastra dunia. Penelitian yang lebih terencana dan terarah perlu dilakukan terhadap komunitas sastra seperti itu.

Kehidupan sastra Indonesia dan sastra daerah tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan asing. Untuk memahami sastra Indonesia dan sastra daerah yang lebih baik, perlu pula dilakukan penelitian terhadap sastra asing yang relevan. Penelitian sastra asing itu dilakukan juga untuk pengembangan teori sastra dan peningkatan mutu karya sastra.

Penelitian sastra Indonesia dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang sastra Indonesia, termasuk sejarah sastra (sastrawan, tokoh sastra, aliran sastra, dan sebagainya), serta peran sastra dalam kaitannya dengan upaya pengembangan bahasa Indonesia.

Penelitian sastra daerah ditujukan pada pemerolehan informasi tentang sastra daerah tertentu dan keseluruhan sastra daerah se-Indonesia sebagai satu komunitas sastra. Penelitian tersebut dapat dilakukan, antara lain, melalui telaah bandingan, telaah kesejarahan, dan telaah tipologi sastra dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti pemerintah daerah setempat dan Pemerintah Pusat.

Penelitian sastra asing dilakukan untuk lebih memahami sastra Indonesia dan sastra daerah, terutama yang telah mengalami kontak dengan sastra asing. Selain itu, penelitian sastra asing juga dapat dimanfaatkan untuk memacu peningkatan mutu karya sastra Indonesia dan sastra daerah. Sastra asing yang diteliti ialah sastra klasik India, Arab, dan Persia serta sastra modern seperti sastra Eropa, sastra Amerika, dan sastra Asia.

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan karya sastra, yang selama ini dikenal sebagai pelestarian sastra lama, adalah upaya yang ditujukan agar generasi baru Indonesia dapat memahami dan menghayati karya sastra tersebut, terutama pesan yang terkandung di dalamnya, baik karya sastra Indonesia maupun sastra daerah, lama atau baru. Pemahaman terhadap karya sastra akan lebih mudah dicapai jika suatu generasi dapat mengalami peristiwa kehidupan sastra itu sendiri. Oleh karena itu, upaya pemeliharaan karya sastra dapat dilakukan melalui pemeliharaan tradisi bersastra di masyarakat, seperti pemeliharaan sastra lisan, pembacaan (pengembangan) naskah lama, dan penuturan dongeng.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa beda pembinaan dan pengembangan bahasa?
- 2) Upaya apa saja yang dapat dilakukan sehubungan dengan peningkatan mutu pemakaian bahasa?

- 3) Dewasa ini anak-anak Indonesia lebih mengenal cerita yang berasal dari luar negeri daripada cerita lokal. Mengapa cerita yang berasal dari luar negeri seperti “Doraemon” lebih dikenal anak-anak? Upaya apa yang dapat dilakukan agar anak-anak kita lebih menyukai cerita lokal, seperti “Timun Emas” atau “Sangkuriang”?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Jelaskan sesuai dengan konsep pembinaan dan pengembangan bahasa.
- 2) Jelaskan upaya-upaya yang dilakukan berikut contoh penerapannya untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa yang dilakukan melalui kegiatan pengajaran dan pemasyarakatan.
- 3) Kemukakan alasan Anda sehubungan dengan kecenderungan siswa lebih kepada film luar dan upaya Anda untuk mengalihkannya.



RANGKUMAN

Pembinaan bahasa ialah upaya untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa. Usaha pembinaan itu mencakup upaya peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa yang dilakukan, antara lain, melalui pengajaran dan pemasyarakatan.

Pengembangan bahasa ialah upaya meningkatkan mutu bahasa agar dapat dipakai untuk berbagai keperluan dalam kehidupan masyarakat modern. Upaya pengembangan itu, antara lain, meliputi penelitian, pembakuan, dan pemeliharaan.

Pembinaan sastra ialah upaya untuk meningkatkan mutu apresiasi sastra. Upaya itu meliputi pengajaran, pemasyarakatan, dan pemberdayaan sastra.

Pengembangan sastra ialah upaya meningkatkan mutu sastra agar dapat dimanfaatkan sebagai media ekspresi, sebagai pencerminan dan pencarian jati diri untuk membangun kebudayaan baru, dan sebagai sarana peningkatan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat. Upaya pengembangan sastra itu meliputi penelitian dan pemeliharaan sastra.

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Agar mutu pendidikan bahasa Indonesia meningkat, perlu dilakukan kegiatan berikut, *kecuali*
 - A. peninjauan ulang kurikulum bahasa Indonesia
 - B. pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan metodologi pengajaran bahasa
 - C. pengembangan tenaga kependidikan kebahasaan yang profesional
 - D. pengembangan sarana pendidikan bahasa yang memadai

- 2) Peningkatan mutu pengajaran bahasa asing di Indonesia dilakukan melalui kegiatan berikut, *kecuali*
 - A. pengembangan kurikulum bahasa asing
 - B. pengembangan tenaga pengajar bahasa asing yang profesional
 - C. pengembangan kamus bahasa asing
 - D. pemanfaatan teknologi informasi dalam bahasa asing

- 3) Dalam upaya pengembangan bahasa daerah, perlu dilakukan kegiatan berikut, *kecuali*
 - A. penelitian
 - B. pembakuan
 - C. pemyarakatan
 - D. pemeliharaan

- 4) Pembakuan bahasa Indonesia dilakukan melalui kegiatan berikut, *kecuali*
 - A. penyusunan buku ajar bahasa Indonesia
 - B. penyusunan kamus bahasa dan kamus bidang ilmu
 - C. penyusunan tata bahasa
 - D. bahan pemyarakatan bahasa

- 5) Untuk meningkatkan mutu apresiasi sastra, dilakukan upaya berikut, *kecuali*
 - A. penelitian sastra
 - B. pengajaran sastra
 - C. pemyarakatan sastra
 - D. pemberdayaan sastra

- 6) Penelitian sastra asing bertujuan sebagai berikut, *kecuali* ...
- untuk mengembangkan sastra Indonesia
 - untuk meningkatkan mutu sastra asing
 - untuk memahami sastra Indonesia dan daerah
 - untuk memacu peningkatan mutu sastra Indonesia dan daerah
- 7) Agar sastra lisan tetap dikenal masyarakat, perlu adanya pemeliharaan antara lain melalui kegiatan berikut, *kecuali*
- penulisan sastra lisan
 - lomba mendongeng
 - penerbitan sastra lisan
 - pertemuan sastrawan dengan siswa

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3**Peranan Bahasa dan Sastra dalam
Pelaksanaan Otonomi Daerah****A. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBINA
DAN MENGEMBANGKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah (Pusat) di bidang pembinaan dan pengembangan bahasa, terutama bahasa daerah, menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Sunda, Jawa, dan Madura), bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara oleh negara, Bahasa-bahasa tersebut merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup."

Era globalisasi dewasa ini telah membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan bahasa dan sastra daerah, perubahan yang terjadi dalam masyarakat penuturnya dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu perkembangan kehidupan politik dan pergeseran nilai-nilai sosial. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tersebut mengharuskan bahasa-bahasa daerah menyesuaikan keberadaannya. Dengan demikian, perubahan tersebut perlu disikapi dengan saksama dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa daerah sehingga dapat tetap lestari dalam arti dapat tampil memperkaya khazanah bahasa Indonesia dan menggeser kata asing yang cenderung digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Keberadaan bahasa daerah dalam konteks pembinaan bahasa nasional perlu lebih ditingkatkan sesuai dengan kedudukan dan fungsi bahasa daerah sebagai sarana komunikasi serta pengungkapan dan pengembangan kebudayaan tradisional Sementara itu, bahasa nasional merupakan sarana pendukung tugas-tugas nasional, alat komunikasi nasional, wahana pemersatu bangsa, serta sarana pengembangan kebudayaan nasional dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di pihak lain, bahasa daerah memiliki fungsi strategis dalam pendidikan dan pembangunan karakter dan jati diri bangsa.

Dalam kaitan itu, perlu ditempuh suatu langkah kebijakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, upaya pembinaan dan pengembangan bahasa daerah dapat terus berdaya guna dan berhasil guna dan hidup di tengah-tengah pergaulan masyarakat sehari-hari.

Dalam menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan kepentingan bahasa daerah yang bersangkutan dengan tetap mengacu pada kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa serta pengembangan bahasa Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan politik yang menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan bahasa daerah. Sehubungan dengan itu, harus diakui bahwa perhatian daerah terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa (dan sastra) daerah selama ini amatlah kurang. Beberapa daerah ada yang telah memprogramkan kegiatan yang berkaitan dengan bahasa daerah, seperti pengajaran bahasa (dan aksara) daerah di kelas permulaan SD, memasukkan bahasa daerah dalam muatan lokal, atau menulis nama jalan beraksara daerah di bawah aksara Latin. Ada pula daerah yang merasa cukup dengan menggunakan bahasa daerah sebagai semboyan, sebagai nama proyek atau gedung tanpa upaya pendalaman yang lebih serius.

Kurangnya perhatian dan kepedulian pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerahnya tidak dapat dilepaskan dari kebijakan politik yang sentralistik, yang tidak memberi ruang gerak bagi pengembangan identitas daerah atau yang menumbuhkan rasa takut untuk dicap daerahisme. Pada sisi lain pemerintah daerah melihat perubahan orientasi dan persepsi masyarakat terhadap bahasa daerah. Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan yang secara teoretis dipandang akan memperlancar komunikasi untuk lingkungan penuturnya, dalam praktiknya tidak demikian. Masalahnya terletak pada kemiskinan bahasa daerah untuk menampung pikiran serta tradisi kebahasaan yang sulit diubah sehingga pemakaian bahasa daerah justru bisa jadi penghambat.

Apresiasi masyarakat penutur bahasa daerah terhadap bahasanya, tampaknya tidak sama di berbagai daerah. Perbedaan sikap itu antara lain ditentukan oleh kedudukan bahasa dalam konteks budaya daerah: ada bahasa daerah yang memiliki ikatan kuat dengan pusat kebudayaan, seperti di Yogyakarta dan Surakarta. Begitu juga halnya dengan di Bali. Sampai sekarang tradisi menulis naskah dengan tulisan tangan yang berbahasa Bali dan beraksara Jawa (Bali) di atas daun lontar atau kertas. Sementara itu, di

beberapa daerah lain bahasa daerah tidak lebih dari sebagai bahasa pergaulan. Hubungan bahasa dan kebutuhan hidup pemakainya akan sangat menentukan daya tahan hidup bahasa tersebut.

Perbedaan sikap dapat terlihat ketika mereka harus mentransfer kata atau nama dalam bahasa daerah ke dalam penggunaan untuk konsumsi masyarakat luar atau untuk situasi formal. Orang Sunda akan menuliskan nama tempat sesuai dengan bunyi ucapan asli, misalnya *Pameungpeuk*, *Haurgeulis*, dan *Cileunyi*. Begitu pula halnya dengan orang Aceh. Mereka menuliskan nama tempat sesuai dengan ucapannya, seperti *Meulaboh* dan *Takengon*. Akan tetapi, orang Minang menuliskan nama [*Nagari Sariak*] menjadi *Nagari Sarik*, [*Koto Laweh*] menjadi *Koto Lawas*, dan [*Tanjung Baraméh*] menjadi *Tanjung Beremas*. Orientasi orang Minang tampaknya ingin menjadi orang Indonesia dengan mengindonesiakan nama tempat itu walau sebetulnya salah kaprah. Orang Minang akan tetap mengucapkan nama tempat itu sesuai dengan aslinya walaupun tulisannya diindonesiakan, kecuali dalam situasi formal.

Dengan adanya kenyataan tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal berikut

1. Keberadaan bahasa sebagai medium komunikasi sangat ditentukan oleh kemampuan bahasa tersebut untuk menampung tuntutan yang berkembang dari pemakainya.
2. Satu bahasa daerah bisa berada dalam satu daerah atau dalam beberapa daerah otonom. Demikian pula sebaliknya, dalam satu daerah otonom bisa terdapat beberapa bahasa daerah. Oleh karena itu, penyerahan kewenangan pembinaan dan pengembangan bahasa (dan sastra) daerah kepada daerah bisa jadi akan menjadi tanggung jawab bersama antara beberapa daerah.
3. Ada bahasa daerah yang memiliki kaitan amat kuat dengan keraton sebagai pusat kebudayaan, sementara tidak sedikit bahasa daerah yang berkedudukan tidak lebih dari sekadar bahasa pergaulan dengan penutur yang amat terbatas dan belum diketahui jumlah kosakata dan tata bahasanya.

B. PERAN PEMERINTAH DAERAH

Semangat berotonomi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diikuti oleh lahirnya Peraturan Pemerintah

No. 25 Tahun 2000 antara lain menyerahkan nasib bahasa daerah kepada pemerintah daerah. Hal tersebut diharapkan tidak akan menggoyahkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ratusan bahasa daerah yang kini tercatat sebagai kekayaan bangsa harus dijaga dan dilestarikan.

Dalam kaitan itu, pemerintah daerah sebagai pengemban tugas pembinaan dan pengembangan bahasa daerah berkewajiban melaksanakan hal berikut.

1. Bahasa daerah yang merupakan kekayaan daerah harus dibina dan dikembangkan. Bahasa daerah seyogianya diperlakukan sebagai pendukung nilai dan tradisi budaya daerah serta sebagai bahasa pergaulan di daerah.
2. Bahasa daerah tidak harus memasuki wilayah administratif pemerintahan dalam arti tidak menyaingi bahasa persatuan. Bahasa daerah bisa menjadi pendukung dan pelengkap efektivitas komunikasi pemerintahan. Misalnya, dalam memberikan penerangan kepada masyarakat tentang tata cara pemilihan kepala daerah (Pilkada) kabupaten/kota di kalangan petani atau nelayan, dapat digunakan bahasa daerah, bahkan dialek setempat. Di wilayah pesisir Cirebon, misalnya, dapat digunakan bahasa Sunda dialek Cirebon.
3. Pemerintah daerah harus bersikap realistis dalam membina dan mengembangkan bahasa daerah. Pendekatan kultural yang dilandasi oleh persepsi dan penghayatan masyarakat pemakai bahasa terhadap bahasanya seyogianya menjadi komitmen sehingga tidak akan terjadi pemaksaan yang merugikan. Bahasa daerah yang akan digunakan sebagai muatan lokal di wilayah tertentu, misalnya, harus mempertimbangkan kehendak masyarakat luas.
4. Pemerintah daerah harus memberikan lebih besar perhatian terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan tradisi daerah dengan memberikan perlakuan yang tepat terhadap bahasa dan sastra daerah.
5. Kurangnya tenaga kebahasaan di daerah diperkirakan akan menjadi penghambat dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan.
6. Bagi daerah otonom yang memiliki lebih dari satu bahasa daerah dapat mengambil langkah prioritas dengan memperhatikan jumlah penutur, luas wilayah penggunaan, dan kaitannya dengan nilai dan persepsi masyarakat dan jika perlu menyerahkan kewenangan tersebut pada daerah otonom kabupaten/kota.

7. Bagi beberapa daerah yang memiliki bahasa daerah yang sama, seyogianya menyusun kebijakan yang sama dan saling mendukung.
8. Pemerintah daerah harus mengingatkan masyarakat bahwa kehidupan bahasa daerah sangat bergantung pada pengguna bahasa itu sendiri.

Kegiatan yang dapat dilakukan pemerintah daerah antara lain sebagai berikut:

1. melakukan inventarisasi tentang bahasa daerah yang ada di daerah;
2. melakukan penelitian kebahasaan dan kesastraan terhadap bahasa daerah sebagai upaya pelestarian yang diharapkan dapat menghasilkan catatan lengkap tentang tata bahasa, kamus, dan sastra daerah;
3. melakukan kajian ulang terhadap berbagai kebijakan yang tidak mendukung upaya pembinaan dan pengembangan serta penyimpangan dari kaidah bahasa, misalnya dalam penulisan yang tidak sesuai dengan ucapan;
4. membukukan ungkapan bahasa daerah yang mengandung kearifan, nilai-nilai, ajaran, dan pandangan hidup masyarakat pengguna bahasa disertai dengan maknanya dalam bahasa Indonesia;
5. menyediakan ruang gerak dan fasilitas bagi masyarakat untuk mengekspresikan dirinya melalui penggunaan bahasa mereka dalam berbagai kegiatan kesenian atau acara lain;
6. meningkatkan apresiasi media massa terhadap bahasa daerah dalam ruang dan tayangannya;
7. menggalang kerja sama antardaerah untuk pencapaian tujuan bersama.

Kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum seluruhnya melakukan upaya konkret dalam memajukan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah di wilayahnya. Hal itu terjadi karena adanya berbagai kendala. Di Irian Jaya, misalnya, terdapat begitu banyak bahasa daerah sehingga sulit mewujudkan pembinaannya. Selain itu, keterbatasan anggaran juga merupakan kendala yang dihadapi beberapa daerah.

Di pihak lain, beberapa daerah telah memprogramkan upaya pembinaan dan pengembangan bahasa daerah secara konseptual dan terencana, terutama di wilayah yang telah memiliki balai bahasa. Dari 33 provinsi yang ada di Indonesia sudah berdiri Pusat Bahasa di Jakarta dan 22 balai bahasa di 22 provinsi, kecuali Provinsi Banten, Bengkulu, Bangka Belitung, Riau Kepulauan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara,

dan Papua. Untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah, tiap-tiap pemerintah daerah telah membuat peraturan daerah. Bahkan, beberapa provinsi yang bahasa daerahnya sama, misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah membuat Surat Keputusan Bersama Gubernur tentang Pembentukan Badan Pekerja Kongres Bahasa Jawa.

Pembentukan badan pekerja oleh ketiga daerah tersebut sepatutnya diikuti oleh daerah-daerah lain dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa daerah karena dengan wadah tersebut dapat dilakukan kegiatan konkret, seperti lomba penulisan aksara daerah, lomba pengembangan bahasa daerah, dan lomba kesenian tradisional berbahasa daerah. Selain itu, untuk dapat melestarikan bahasa daerah di beberapa daerah telah diupayakan penyusunan pedoman penulisan buku ajar bahasa daerah (bahasa Jawa) serta pertemuan bahasa dan sastra lokal. Yang paling penting ialah upaya menjadikan bahasa daerah sebagai muatan lokal dalam kurikulum sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama.

Dengan adanya pembinaan dan pengembangan bahasa daerah secara terencana dan terprogram, dapat diharapkan bahasa daerah akan makin mampu berperan dan berfungsi sebagai salah satu sarana pendidikan dini dan sebagai landasan pengembangan bahasa Indonesia. Sebagai penerus cita-cita bangsa dan sarana pembangunan nasional, generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan bahasa daerah dalam memperluas cakrawala berpikir dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa daerah juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam memperkukuh cagar budaya bangsa pada era globalisasi.

Dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah, diperlukan kebijakan politik, kebijakan yuridis, dan kebijakan finansial.

1. Kebijakan Politik

Dalam pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra harus ada kebijakan politik yang lazim disebut politik bahasa (dan sastra). Dalam kebijakan itu, pemerintah daerah dipandang perlu memiliki kemauan politik tentang bahasa daerah. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan strategis dalam merealisasikan program pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah. Sesuai dengan sifat dan prosedurnya, kebijakan politik itu berawal dari keputusan badan legislatif (DPRD), baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

2. Kebijakan Yuridis

Kebijakan politik tersebut harus ditindaklanjuti dengan kebijakan yuridis yang mendukung arah pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah. Kebijakan yuridis tersebut berupa penerbitan surat kewenangan kepada lembaga yang relevan untuk menyusun dan merealisasikan program pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah.

Berdasarkan kebijakan itu, program pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah dapat direalisasikan dalam dua bentuk kegiatan, yakni kegiatan pendidikan formal di sekolah dan kegiatan pendidikan luar sekolah. Pendidikan formal direalisasikan dalam bentuk pendidikan muatan lokal, sedangkan pendidikan luar sekolah direalisasikan dalam bentuk penyegaran, penataran, penyuluhan, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media massa).

3. Kebijakan Finansial

Untuk mendukung pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah, diperlukan kebijakan finansial. Kebijakan itu ditempuh untuk mendapatkan alokasi dana sesuai dengan yang tersedia. Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah itu antara lain sebagai berikut.

- a. inventarisasi sastra lisan daerah;
- b. penerjemahan naskah berbahasa daerah;
- c. seminar/pertemuan tentang bahasa dan sastra daerah;
- d. penyusunan antologi sastra lisan daerah;
- e. penyusunan antologi tembang/lagu daerah;
- f. penyusunan abstrak hasil penelitian bahasa dan sastra daerah;
- g. penerbitan hasil penelitian;
- h. pemberian bantuan dana kepada sanggar seni tradisional/seniman pendukungnya;
- i. pembinaan tata krama berbahasa daerah;
- j. pemberian bantuan dana honorarium penulisan karangan berbahasa daerah;
- k. pemberian hadiah tahunan untuk karangan terbaik yang dimuat di majalah/media massa lainnya; serta
- l. pemberian bantuan dana untuk penerbitan majalah/surat kabar berbahasa daerah.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan kebijakan dalam bidang apa saja yang seharusnya dilakukan untuk mengupayakan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah!
- 2) Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan pemerintah mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa daerah? Jelaskan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Ada berbagai bidang kebijakan, Anda jelaskan satu per satu.
- 2) Jelaskan kegiatan apa saja yang dilakukan baik yang formal maupun nonformal!



RANGKUMAN

Dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah, diperlukan kebijakan politik, kebijakan yuridis, dan kebijakan finansial. Dalam kebijakan itu, pemerintah daerah dipandang perlu memiliki kemauan politik tentang bahasa daerah. Kebijakan politik dapat merupakan kebijakan strategis badan legislatif (DPRD), baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota dalam merealisasikan program pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah

Kebijakan yuridis merupakan tindak lanjut kebijakan politik yang mendukung arah pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah. Kebijakan yuridis tersebut berupa penerbitan surat kewenangan kepada lembaga yang relevan untuk menyusun dan merealisasikan program pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah.

Berdasarkan kebijakan itu, program pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah dapat direalisasikan dalam dua bentuk kegiatan, yakni kegiatan pendidikan formal di sekolah dan kegiatan pendidikan luar sekolah. Pendidikan formal direalisasikan dalam bentuk pendidikan muatan lokal, sedangkan pendidikan luar sekolah direalisasikan dalam bentuk penyegaran, penataran, dan penyuluhan, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media massa).

Untuk mendukung pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah, diperlukan kebijakan finansial. Kebijakan itu diperlukan untuk mendapatkan alokasi dana tentang kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembinaan dan pengembangan bahasa daerah menjadi tanggung jawab
 - A. pemerintah pusat
 - B. pemerintah pusat dan pemerintah daerah
 - C. pemerintah daerah
 - D. lembaga pendidikan setempat

- 2) Upaya pembinaan dan pengembangan bahasa daerah antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan berikut, kecuali
 - A. penerjemahan buku berbahasa daerah
 - B. kongres tentang bahasa daerah
 - C. penyusunan antologi sastra lisan daerah
 - D. penyusunan antologi tembang/lagu daerah

- 3) Upaya pembinaan dan pengembangan sastra daerah antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan berikut, kecuali
 - A. pemberian hadiah tahunan untuk cerpen/puisi terbaik yang dimuat di majalah/media massa lainnya
 - B. pemberian bantuan dana untuk penerbitan majalah/surat kabar berbahasa daerah
 - C. penerjemahan karya sastra berbahasa daerah
 - D. penyusunan antologi cerita rakyat

- 4) Untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, generasi muda perlu menguasai
 - A. hanya bahasa Inggris
 - B. hanya bahasa Indonesia
 - C. hanya bahasa daerah
 - D. bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing

- 5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah di wilayahnya, pemerintah daerah mengalami kendala berikut, kecuali
 - A. banyaknya bahasa daerah yang penuturnya hanya ratusan orang
 - B. terlalu besarnya jumlah penutur
 - C. keterbatasan dana
 - D. ketiadaan tokoh bahasa dan sastra setempat

- 6) Dalam upacara pembukaan Pekan Seni Se-Sumatera Barat yang diadakan di Padang, Gubernur Sumatera Barat harus menyampaikan pidato sambutannya dalam bahasa
 - A. Minangkabau sebagai wujud kebanggaan daerah
 - B. Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan
 - C. Inggris sebagai bahasa internasional
 - D. Indonesia dan Inggris sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa internasional

- 7) Dalam upacara adat perkawinan Batak, seorang tokoh adat menyampaikan nasihat perkawinannya dalam bahasa Batak. Hal itu sesuai dengan fungsinya sebagai
 - A. lambang identitas daerah
 - B. lambang kebanggaan daerah
 - C. sarana komunikasi antaretnis
 - D. sarana untuk memperkuat kebudayaan Indonesia

- 8) Dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Sulawesi Selatan para anggota dewan harus menggunakan
 - A. bahasa Bugis
 - B. bahasa Makassar
 - C. bahasa Indonesia
 - D. bahasa Indonesia dan bahasa Makassar

- 9) Agar masyarakat mudah memahaminya, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara harus menggunakan
 - A. bahasa Indonesia
 - B. bahasa Batak Karo
 - C. bahasa Batak Toba
 - D. bahasa daerah setempat

10. Dalam kampanye tentang penggunaan pupuk dan bibit unggul kepada masyarakat petani di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Seluma dapat menggunakan
- A. bahasa Indonesia
 - B. bahasa daerah setempat
 - C. bahasa Bengkulu
 - D. bahasa Indonesia campur bahasa daerah setempat

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B benar karena sesuai dengan teks Undang-Undang Dasar 1945.
A, C, D salah karena tidak sesuai dengan teks Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) A benar karena bahasa Indonesia tidak berfungsi sebagai alat pemersatu antarsuku
B, C, D salah karena sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagaimana dinyatakan pada butir B, C, D tersebut.
- 3) A benar karena upacara tersebut merupakan upacara resmi intern keraton
B, C, D salah karena situasinya tidak resmi.
- 4) C benar karena bahasa Batak dalam upacara adat perkawinan itu melambangkan identitas etnik Batak
A, B, D salah karena upacara menunjukkan identitas daerah.
- 5) D benar karena *lingua franca* berarti 'bahasa perantara'
A, B, C salah karena berkaitan dengan fungsi bahasa bukan artinya.
- 6) C benar karena bahasa Indonesia telah diikrarkan pada 28 Oktober 1928.
A, B, D salah karena pada masa pemerintahan Belanda memang digunakan bahasa Indonesia dan bahasa Belanda, tetapi pada masa pemerintahan Jepang hanya digunakan bahasa Indonesia
- 7) C benar karena wayang golek merupakan kesenian khas daerah Jawa Barat yang sarana penyampaiannya menggunakan bahasa Sunda.
A, B, D salah
- 8) B benar karena dalam kongres tersebut bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional Indonesia (Sumpah Pemuda) yang berperan untuk mempersatukan ide bangsa Indonesia.
A, C, D salah
- 9) A benar karena sebagai alat perhubungan antardaerah adalah kedudukannya sebagai bahasa nasional.
B, C, D benar karena itulah fungsi bahasa negara.
- 10) D benar karena bahasa Arab dipakai dalam kehidupan agama dan budaya Islam.

A, B, C salah karena yang dipakai untuk keperluan itu ialah bahasa Inggris.

Tes Formatif 2

- 1) A benar karena peninjauan ulang kurikulum tidak langsung berkaitan dengan peningkatan mutu pengajaran bahasa Indonesia.
B, C, D salah karena hal itu merupakan penunjang keberhasilan pengajaran bahasa Indonesia.
- 2) D benar karena pemanfaatan teknologi informasi berbahasa asing tidak berpengaruh pada mutu pengajaran bahasa asing.
A, B, C salah karena ketiga hal itu dapat berpengaruh dalam peningkatan mutu pengajaran bahasa asing.
- 3) C benar karena pemasyarakatan merupakan kegiatan pembinaan bahasa daerah.
A, B, D salah karena ketiga kegiatan itu merupakan langkah pengembangan bahasa daerah.
- 4) A benar karena penyusunan bahan ajar bahasa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan mutu pengajaran bahasa Indonesia.
A, B, C salah karena ketiga hal itu merupakan langkah pembakuan bahasa Indonesia.
- 5) A benar karena penelitian sastra termasuk salah satu upaya pengembangan sastra
B, C, D salah karena ketiga kegiatan itu termasuk upaya pembinaan sastra yang bertujuan meningkatkan mutu apresiasi sastra masyarakat.
- 6) B benar karena penelitian sastra asing tidak akan meningkatkan mutu pengajaran sastra asing tersebut.
A, C, D salah karena ketiga hal itu merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian sastra asing.
- 7) D benar karena pertemuan sastrawan dengan siswa lebih tertuju pada pembinaan sastra Indonesia (modern).
A, B, C salah karena ketiga hal itu merupakan upaya pelestarian sastra lisan.

Tes Formatif 3

- 1) C benar karena bahasa daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
A salah karena Pemerintah Pusat bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.
B salah karena baik pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab masing-masing.
D salah karena lembaga pendidikan setempat bertanggung jawab tentang pendidikan, semua bidang ilmu.
- 2) C benar karena hal itu merupakan salah satu upaya pembinaan dan pengembangan bahasa daerah.
A, B, D salah karena semuanya cocok dengan pernyataan di atas.
- 3) B benar karena pemberian bantuan dana untuk penerbitan media massa cetak berbahasa daerah merupakan salah satu upaya pembinaan dan pengembangan bahasa daerah.
A, C, D salah karena ketiganya merupakan upaya pembinaan dan pengembangan sastra daerah
4. D benar karena penguasaan bahasa yang lebih banyak akan mempermudah pemahaman terhadap iptek.
A, B, C salah karena keterbatasan penguasaan bahasa akan terbatas pula pemahaman tentang iptek.
- 5) B benar besarnya jumlah penutur justru akan mempermudah pelaksanaan
A, C, D salah karena itulah kendala yang dihadapi pemerintah daerah
- 6) B benar karena dalam situasi itu gubernur sebagai pejabat pemerintah harus menggunakan bahasa resmi dalam pemerintahan, yaitu bahasa Indonesia. A, C, D salah karena upacara pemukaan itu merupakan situasi resmi
- 7) A benar karena upacara adat perkawinan tiap daerah berbeda-beda dan merupakan lambang identitas daerah
B, C, D salah bahasa Batak dalam hal itu bukan sebagai lambang kebanggaan daerah atau sarana komunikasi antaretnis, atau sarana memperkuat kebudayaan Indonesia.
- 8) C benar karena bahasa Indonesia merupakan bahasa negara dan sidang DPRD adalah salah satu kegiatan resmi pemerintahan.

A, B, D salah karena bahasa daerah tidak boleh digunakan dalam urusan pemerintahan.

- 9) A benar karena semua dokumen yang bertalian dengan pemerintahan harus ditulis dalam bahasa Indonesia.

B, C, D salah karena peraturan daerah merupakan dokumen resmi negara yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan.

- 10) D benar agar informasi sampai kepada sasaran.

A, B, C salah karena penguasaan bahasa Indonesia petani pada umumnya sangat terbatas.

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan, Dendy Sugono, dan S.R.H. Sitanggang. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1998. *Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000*. Risalah Kongres Bahasa Indonesia VI. Jakarta.
- Alwi, Hasan, Dendy Sugono, dan Abdul Rozak Zaidan (Penyunting). 2000. *Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2000. *Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sugono, Dendy dan Abdul Rozak Zaidan (Penyunting). 2001. *Bahasa Daerah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Pusat Bahasa.